



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIRJEN KETENAGALISTRIKAN DAN
DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 17 Januari 2018
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 18.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemeritah	: Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PT PLN (Persero)
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Program 35.000 MW. 2. Kebijakan Pemerintah Tidak Ada Kenaikan Tarif Dasar Listrik Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan Dan Operasional. 3. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si., dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Program 35.000 MW.
 - b. Kebijakan Pemerintah Tidak Ada Kenaikan Tarif Dasar Listrik Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan Dan Operasional.
 - c. Dan lain-lain.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI atas kebijakan yang tidak menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sampai triwulan pertama 2018 dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT. PLN (Persero) agar tetap sehat secara finansial dan dapat meningkatkan investasinya.
2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan akan dikoordinasikan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI menetapkan kebijakan harga khusus untuk *Domestic Market Obligation* (DMO) batubara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dan *Independent Power Producer* (IPP). Selanjutnya kesimpulan ini akan dimasukkan dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri ESDM RI yang akan datang.
3. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan data secara detail dan komprehensif desa yang belum teraliri listrik disertai kendala dan rencana pelaksanaan pembangunannya.
4. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan data sebaran pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik (TTL) Tahun 2018 berdasarkan wilayah diseluruh Indonesia dan disampaikan kepada Sekretariat Komisi VII DPR RI.
5. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan perkembangan Pembangkit Program 35.000 MW dan penyelesaian pembangkit sebelumnya secara rinci, dan disampaikan kepada Sekretariat Komisi VII DPR RI.

6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Januari 2018.

III. PENUTUP

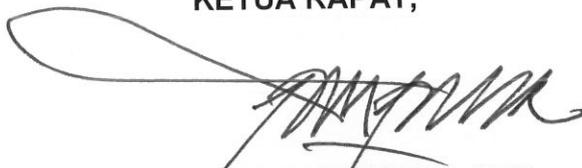
Rapat ditutup 18.40 WIB

**DIRJEN KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ESDM RI**



Dr. Ir. ANDY NOORSAMAN SOMENG, DEA

Jakarta, 17 Januari 2018
KETUA RAPAT,



Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si

**DIREKTUR UTAMA
PT PLN (PERSERO)**



SOFYAN BASIR